

# Membuat pengetahuan berkarya bagi hutan dan rakyat



## Laporan Tahunan 2010



## Photo Sampul:

**Tengah:** *Pandanus sp* (TBI Indonesia)

**Atas dari kiri ke kanan:** Konsultasi publik hasil penilaian KNKT (TBI Indonesia); Bunga liar (Aryo Bhirowo); Kura-kura (TBI Indonesia); Bentang alam di Mamasa, Sulawesi Selatan (Hunggul Yudhono).

**Bawah dari kiri ke kanan:** Bunga liar (Yonky Indrajaya); Ikan asap (Aryo Bhirowo); Pengukuran tingkat kematangan gambut (TBI Indonesia); Semai di kayu mati (Yonky Indrajaya).

**Kiri atas ke bawah:** Katak (TBI Indonesia); Bunga liar (Yonky Indrajaya); Pencari rumput (Aritta Suwarno).

**Kanan atas ke bawah:** Buah hutan (Yonky Indrajaya); *Draco sp* (Aryo Bhirowo); Anak-anak teluk Meranti (Aryo Bhirowo).



## Kredit Photo

Hal i	Hutan penelitian Cikole, Bandung, Jawa Barat (Aryo Bhirowo).	Hal 34	Yonky Indrajaya; TBI Indonesia.
Hal 4	Eko Manjela; TBI Indonesia; Ishak Yassir.	Hal 36	Kresno D Santosa; Univ Brawijaya; Hunggul Yudhono; Universitas Brawijaya.
Hal 6	TBI Indonesia; TBI Indonesia.	Hal 38	TBI Indonesia; TBI Indonesia.
Hal 10	Aritta Suwarno; Aryo Bhirowo.	Hal 42	TBI Indonesia; TBI Indonesia; TBI Indonesia; TBI Indonesia.
Hal 12	Aritta Suwarno; Aritta Suwarno	Hal 44	TBI Indonesia; Tetuko Yuwono; Indrawan Suryadi; Aryo Bhirowo.
Hal 14	Tri Wira Yuwati; Aritta Suwarno	Hal 46	Yuli Nugroho; Eko Manjela.
Hal 16	Aryo Bhirowo; Tri Wira Yuwati; TBI Indonesia; Hunggul Yudhono.	Hal 48	Eko Manjela; TBI Indonesia; TBI Indonesia; TBI Indonesia.
Hal 18	Tri Wira Yuwati; Tri Wira Yuwati.	Hal 49	Aritta Suwarno; Aritta Suwarno.
Hal 20	Tri Wira Yuwati; Tri Wira Yuwati; Tri Wira Yuwati; Tri Wira Yuwati.	Hal 50	Denni Indrawan.
Hal 22	Yonky Indrajaya; Yonky Indrajaya.	Hal 54	TBI Indonesia; Aryo Bhirowo.
Hal 24	Yonky Indrajaya; Yonky Indrajaya; Yonky Indrajaya; Yonky Indrajaya.	Hal 56	Aritta Suwarno.
Hal 26	Yonky Indrajaya; Aritta Suwarno.	Hal 58	Aritta Suwarno.
Hal 28	Tri Wahyudiyati; Tri Wahyudiyati; Tri Wahyudiyati; Tri Wahyudiyati.	Hal 61	Aritta Suwarno; Aritta Suwarno.
Hal 30	Aryo Bhirowo; Aryo Bhirowo.	Hal 63	Aritta Suwarno.
Hal 32	TBI Indonesia; TBI Indonesia; TBI Indonesia; Aryo Bhirowo.	Hal 65	Aryo Bhirowo.

# Daftar Isi

Pesan dari Direktur Program	4
Selayang Pandang Tropenbos International	6
Selayang Pandang TBI Indonesia	8
Lokasi Kegiatan	10
Capaian 2009	
Program PhD	12
Pelibatan Masyarakat Lokal dalam Revisi Tata Ruang	16
Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Lindung	20
Perdagangan Karbon dalam Jasa Lingkungan	24
Kewajiban Sosial Perusahaan di Bidang Lingkungan	28
Nilai Konservasi Tinggi	
Dari Penilaian Menuju KPHP	32
Restorasi Bentang Alam	36
Konsorsium Hijau	40
Laboratorium GIS Terpadu	44
Peningkatan Kapasitas	48
Manajemen Unit	
Operasional Kantor	50
Staff	54
General Board dan BNC	56
Laporan Keuangan	58
Mitra dan Jaringan	60

**T B I I n d o n e s i a**

**Tropenbos International Indonesia Programme**



Tahun ini adalah tahun terakhir - tahun ke lima - dari rencana kerja lima tahunan Tropenbos International Indonesia Programme (TBI Indonesia) 2007-2011. Tahun di mana evaluasi akan dilakukan dan kelanjutan program di tahun yang akan datang akan ditetapkan. Bulan November 2011 merupakan tahun ke 25 keberadaan TBI di Indonesia. Oleh karena itu evaluasi tersebut, selain akan melihat hasil kerja selama lima tahun - tentu akan berisi pula hasil refleksi selama 25 tahun dalam memastikan bahwa pengetahuan berkarya bagi hutan dan rakyat.

Laporan kali ini menyampaikan berbagai capaian selama lima tahun terakhir untuk lima pendekatan intervensi utama TBI Indonesia. Dalam hal 'penciptaan ilmu pengetahuan baru' dapat dilaporkan bahwa ke empat calon PHD kesemuanya telah lulus dari ujian awal dan pada tahun 2011 mereka akan melakukan penelitian lapangan di Indonesia. Peningkatan kapasitas institusi tahun ini difokuskan kepada para mitra untuk mengenal lebih jauh pentingnya penilaian, pemantauan, dan pengelolaan

# Pesan dari Direktur Program

kawasan dengan nilai konservasi tinggi. Selain anggota konsorsium HCVF, mitra utama kita dalam kegiatan ini adalah INSTIPER Jogjakarta yang mempunyai jejaring luas dengan industri kelapa sawit. Dengan mitra utama kita, Badan Litbang Kehutanan, telah dicapai kata sepakat akan perlunya pengembangan laboratorium sistem informasi geografis yang akan dibangun pada tahun 2011. Peningkatan kapasitas personil, terutama adalah memastikan ke empat calon PHD tersebut di atas bersama dengan 8 calon Master yang menyertainya dapat menyelesaikan programnya tepat waktu. Dalam hal komunikasi dan dialog, tahun ini kita mendapatkan mitra penting dalam pengelolaan bentang alam yaitu Universitas Brawijaya, Malang dan PT RAPP. Tahun ini kita disibukkan dengan berbagai laporan dan presentasi - khususnya mengenai pengelolaan Semenanjung Kampar. Sedangkan keterkaitan program nasional dengan agenda internasional berpusat pada pengelolaan bentang alam dan perubahan iklim.

Sebagai tahun terakhir dari program lima tahunan kita patut bersyukur karena sebagian besar sasaran telah dicapai, khususnya kegiatan kemitraan. Ketertinggalan program doktor yang tahun ini baru memasuki tahun ke dua dari 4 tahun program nampaknya harus menjadi pemacu sekaligus penentu bagi keberlanjutan program Tropenbos di Indonesia.

Selamat memasuki program lima tahunan berikutnya dengan penuh harapan dan optimisme yang tinggi.

Petrus Gunarso, PhD



# Selayang Pandang



Jutaan manusia di daerah tropis memiliki ketergantungan yang besar terhadap hutan. Hal ini serasa sebuah ironi jika memiliki kondisi sumberdaya hutan yang terus menurun serta ancaman kelestariannya yang tinggi. Selama bertahun-tahun, TBI telah memantapkan dirinya sebagai platform penting dalam mendukung agenda kehutanan dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang. TBI membangun reputasi untuk menghasilkan pengetahuan dan pengembangan kapasitas pribadi dan kelembagaan, memfasilitasi dialog, dan memperkuat hubungan antara perdebatan kehutanan di tingkat nasional dan internasional. Hal ini terus dilakukan sebagai upaya untuk memperkenalkan pengetahuan serta hasil penelitian ke dalam lingkup pembuat kebijakan. TBI juga mengambil peran sebagai perantara antara kelompok kebijakan dan pengelola dengan kelompok peneliti. Tujuan utama TBI adalah terwujudnya tata pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik di hutan tropis.

TBI menangani masalah-masalah melalui pengembangan dan pengelolaan



# Tropenbos International (TBI)

## Membuat pengetahuan berkarya bagi hutan dan rakyat

kegiatan penelitian, serta peningkatan kapasitas. Kegiatan penelitian di masing-masing negara di mana program TBI berlangsung, dilakukan guna menjawab permasalahan kehutanan di wilayah kerja masing-masing, sekaligus meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan institusi untuk menghasilkan dan menerapkan pengetahuan baru. Agenda internasional juga disertakan dalam setiap program yang akan menjadi bahan perdebatan kehutanan internasional terkait dengan kasus, pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh.

Program TBI dilaksanakan melalui kemitraan dengan berbagai kepentingan dan tanggung jawab. Mitra universitas serta institusi penelitian dan pelatihan bertanggung jawab untuk penelitian dan pelatihan, sementara mitra yang mewakili kebijakan kehutanan dan pemanfaatan hutan menentukan isu-isu yang akan di bahas dari setiap proyek. Mitra lokal menjadi pemeran utama dalam pelaksanaan setiap program. Mitra Belanda dan negara-negara lain memainkan peran untuk mendukung kegiatan terkait. TBI memfasilitasi kemitraan dan kegiatan yang dihasilkan

serta menterjemahkannya menjadi informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dan pengelolaan hutan.

Selama bertahun-tahun, TBI telah berevolusi menjadi sebuah organisasi yang membuat pengetahuan berkarya bagi hutan dan rakyat, dengan memungkinkan ketersediaan keputusan yang berbasis informasi dan pengetahuan dalam perbaikan manajemen dan tata kelola hutan tropis. Keberadaan TBI yang cukup lama serta kemampuan untuk membawa mitra lokal, nasional dan internasional menjadikan TBI sebagai mitra yang terpercaya dalam pembangunan berkelanjutan.

Pada tahun 2010, TBI memiliki lima program di beberapa negara, yaitu di Kolombia, Suriname, Ghana, Vietnam dan Indonesia, dan program regional di Kongo Basin (Kamerun dan Republik Demokrasi Kongo). TBI juga terlibat sebagai mitra dalam proyek-proyek di Bolivia dan Guyana.

Informasi lebih lanjut tentang berbagai program dan kegiatan TBI dapat diperoleh di [www.tropenbos.org](http://www.tropenbos.org)



# Selayang Pandang



Selama hampir 25 tahun Tropenbos International (TBI) telah mengambil peran penting dalam mendukung kegiatan kehutanan dan pembangunan di negara-negara berkembang. TBI membangun reputasi dalam pengadaan ilmu pengetahuan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan institusi, fasilitasi dialog, dan penguatan hubungan antara forum kehutanan nasional dan internasional. Hal tersebut sangat penting dilakukan untuk mendukung penggunaan ilmu pengetahuan dalam pengambilan keputusan di bidang kebijakan dan pengelolaan kehutanan. Hal tersebut juga menjelaskan peran TBI sebagai jembatan antara pihak pembuat kebijakan, pengelola dan peneliti. Tujuan utama TBI adalah terwujudnya tata kelola kehutanan dan pengelolaan sumberdaya hutan tropis yang lebih baik.

TBI Indonesia merupakan salah satu dari lima *country programme* TBI yang memulai kegiatannya di Indonesia sejak tahun 1986. Kesepakatan kerjasama antara TBI Indonesia dengan pemerintah Indonesia secara resmi dilakukan sejak tahun 1997.

# TBI Indonesia

Sebagai upaya pencapaian tujuan, TBI Indonesia melakukan berbagai kegiatan dalam kerangka kemitraan untuk mendapatkan dan menghasilkan pengetahuan melalui kegiatan penelitian serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, baik di lingkungan Badan Litbang Kehutanan serta staff dari mitra yang lain. Hal tersebut juga sebagai upaya untuk mendukung proses pertukaran informasi dan dialog untuk isu-isu kunci yang terkait dengan prioritas program.

Fokus kegiatan TBI Indonesia tidak terbatas pada kawasan hutan lindung, melainkan juga pada berbagai aspek yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.

**Visi:** Peningkatan peran pengetahuan dan keahlian dalam meningkatkan tata kelola kehutanan dan pengelolaan hutan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan yang berkelanjutan.

**Misi:** Memberi kontribusi terhadap penggunaan dan tata kelola hutan tropika yang lebih baik untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, konservasi, dan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan utama dari TBI Indonesia adalah untuk mendukung pemerintah Indonesia melalui penyediaan informasi untuk formulasi dan implementasi kebijakan dengan berdasarkan pengetahuan yang memadai dan peningkatan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap kawasan lindung untuk kepentingan rakyat, konservasi dan pembangunan berkelanjutan.





# Lokasi Kegiatan 2010



# CAPAIAN 2010



Sebagai bagian dari upaya untuk membuat pengetahuan berkarya bagi hutan dan rakyat, TBI Indonesia melakukan berbagai kegiatan terkait dengan penyediaan ilmu pengetahuan, peningkatan sumberdaya manusia dan organisasi, dialog serta pembentukan dan penguatan jaringan untuk tata kelola kehutanan yang lebih baik.

Di tahun 2010, TBI Indonesia melakukan berbagai kegiatan yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu: (1) kegiatan pokok berupa penyediaan ilmu pengetahuan melalui program PhD dan (2) kegiatan kolaboratif dengan mitra, terkait dengan peningkatan tata kelola kehutanan.

Capaian terbesar yang dilakukan oleh TBI Indonesia di tahun 2010, adalah diterimanya data hasil penilaian konservasi tinggi di Semenanjung Kampar oleh Kementerian Kehutanan sebagai data acuan dalam pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Tasik Besar Serkap.

Hal lain yang menjadi capaian TBI Indonesia di tahun 2010 (baik untuk



# Program Penelitian PhD

kegiatan pokok maupun kegiatan kolaboratif) dituangkan dengan lebih rinci pada laporan ini sebagai berikut.

Program penelitian PhD dilaksanakan dalam empat tema yang telah disepakati oleh Tropenbos International dan Badan Litbang Kehutanan untuk menyediakan ilmu pengetahuan dan peningkatan kapasitas staff menuju tata kelola hutan yang lebih baik.

Keempat tema penelitian PhD tersebut adalah:

1. Pelibatan masyarakat lokal dalam proses revisi tata ruang.
2. Pengelolaan kolaboratif kawasan lindung.
3. Perdagangan carbon dalam jasa lingkungan.
4. Kewajiban sosial perusahaan di bidang lingkungan.

Program penelitian PhD di tahun 2010 telah memasuki tahun ke 2, dengan perkembangan studi yang berbeda untuk masing-masing proyek penelitian.

Sebagai wujud komitmen TBI dalam hal perolehan pengetahuan baru dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk perbaikan tata kelola Kehutanan di Indonesia, TBI Indonesia bekerjasama dengan Badan Litbang Kehutanan memberikan beasiswa kepada 4 staff Badan Litbang Kehutanan untuk mengambil program Phd di Universitas di Belanda (Wageningen University, Leiden University dan Institut of Geoscience - ITC) dan di Australia (Charles Sturt University).



Pendekatan rencana tata ruang untuk mewujudkan penggunaan ruang dan pengelolaan lingkungan yang lestari, dengan memperhatikan aspek sosial, ekologi dan ekonomi, semakin diperlukan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berakibat pada peningkatan kebutuhan lahan baik untuk perumahan, pertanian, industri serta infrastruktur lainnya.

Hal tersebut menjadi sangat penting apabila terkait dengan isu kepemilikan lahan, wilayah kepemilikan serta hak masyarakat adat. Umumnya, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui negosiasi kepentingan dan persepsi antar pemangku kepentingan.

Terminologi masyarakat adat di Indonesia diasosiasikan melalui beberapa terminology seperti masyarakat asli, masyarakat yang terisolasi, komunitas adat atau masyarakat yang memiliki hukum adat tertentu. Terminologi masyarakat adat secara umum diartikan sebagai sekelompok masyarakat yang



# Pelibatan Masyarakat Lokal dalam Revisi Tata Ruang

mendiami suatu wilayah tertentu dan melakukan kehidupannya dengan berdasarkan pada nilai tertentu yang telah disepakati dalam komunitas tersebut secara turun temurun. Pada sisi lain, masyarakat adat juga diidentifikasi berdasarkan tingkat ketergantungan mata pencaharian mereka terhadap hutan dan pola pertanian yang mereka lakukan.

Meskipun pengakuan terhadap masyarakat adat telah dilakukan melalui peraturan resmi, baik dalam tingkat nasional hingga pada tingkat kabupaten, hal tersebut tidaklah mengurangi permasalahan dalam implementasi

di lapangan, terutama dalam hal pengakuan hak ulayat atau hak adat dan wilayah mereka.

Pengakuan akan hak masyarakat adat dan wilayah yang ditempati memerlukan waktu dan proses yang panjang, dan sering dilakukan tanpa adanya panduan implementasi yang jelas. Pengakuan terhadap hak adat ini termasuk diantaranya adalah dalam hal hak untuk mendapatkan mata pencaharian dari dalam hutan serta penggunaan lahan hutan dengan tanpa merusak fungsi hutan tersebut.

Penyusunan tata ruang di beberapa

Penyusunan tata ruang di beberapa daerah di Indonesia saat ini masih dilakukan dengan tanpa melibatkan masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses tersebut mengakibatkan banyaknya permasalahan terkait dengan pelaksanaan di lapangan.



daerah di Indonesia saat ini masih dilakukan dengan tanpa melibatkan masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses tersebut mengakibatkan banyaknya permasalahan terkait dengan pelaksanaan di lapangan.



Kondisi ini telah mendorong beberapa pemerintahan Kabupaten untuk mencoba memecahkan permasalahan tersebut. Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan di seputar penyusunan tata ruang dengan melibatkan masyarakat lokal, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari model pendekatan dalam perencanaan tata ruang dengan mengintegrasikan pendekatan kelembagaan dan pendekatan teknis dalam proses pengambilan keputusan untuk membantu perencana dan parapihak yang terlibat dalam perencanaan kebijakan.



Pada penelitian ini akan dilakukan penyusunan model rencana tata ruang yang yang dicirikan oleh:

1. Struktur kelembagaan yang legitimate melibatkan para pihak terkait dalam skema yang optimal.
2. Mekanisme yang jelas dan terstruktur baik untuk penyusunan rencana tata ruang dengan melibatkan masyarakat lokal dan hak-haknya yang telah ada secara turun temurun.
3. Adanya alat/instrument teknis



yang optimal yang secara sosial dapat diterima, secara teknis dapat dilaksanakan sesuai sasaran dan tujuan perencanaan rencana tata ruang di tingkat kabupaten untuk menjawab isu-isu kelestarian lingkungan dan ketidakpastian matapencarian serta investasi.

4. Langkah dan prosedur yang benar dalam mendayagunakan proses pengambilan keputusan berbasis analisis ilmiah kedalam proses penyusunan tata ruang.

Tujuan utama dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk menyusun rekomendasi bagi pembuat keputusan di bidang perencanaan tata ruang dalam hal penataan ruang serta proses implementasinya dengan mempertimbangkan multi perspektif dari para pihak terkait, khususnya masyarakat adat.



## Hunggul Yodhono BPK Makasar

Ketika persoalan kompetisi ruang antara hutan dengan penggunaan lainnya bergabung dengan isu klaim masyarakat adat dan isu kerusakan lingkungan, maka pengelolaan hutan terkait penataan ruang menjadi isu sensitif yang membutuhkan pendekatan sistematis dan integral guna menghindari timbulnya dampak negatif baik dari sisi sosial, ekonomi maupun lingkungan dikemudian hari.

Dari berbagai literatur, walaupun pendekatan sistematis dan integrative senantiasa dikembangkan, ternyata sampai dengan saat ini bahkan di Negara maju sekalipun masih menyisakan gap pengetahuan yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Kontribusi kita pada upaya mengisi kekosongan ilmu pengetahuan ini akan sangat bermanfaat tidak hanya pada kepentingan ilmu pengetahuan tetapi juga pada kepentingan praktis.



Hampir sebagian besar dari kawasan lindung di Indonesia merupakan kawasan yang menjadi sumber mata pencaharian dan penghidupan bagi masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan tersebut. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya konflik horisontal antara pemerintah yang berkepentingan untuk menjaga kelestarian kawasan lindung dan kepentingan ekonomi masyarakat.

Undang-undang No 41 tahun 1999 menyatakan bahwa kawasan lindung dibagi menjadi dua yaitu hutan lindung dan kawasan konservasi. Kewenangan kawasan konservasi masih berada di bawah pemerintah pusat sedangkan untuk hutan lindung, kewenangan dilimpahkan pada pemerintah daerah. Akan tetapi, proses desentralisasi belum berhasil untuk mendefinisikan perbedaan tingkat dan cakupan tanggung jawab terhadap sumber daya alam di Indonesia. Desentralisasi telah mengharuskan pemerintah daerah untuk mencari dan meningkatkan sendiri pendapatan daerahnya sehingga daerah yang memiliki kekayaan sumber

# Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Lindung

daya alam yang tinggi berusaha untuk mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya dari sumber daya alam di daerahnya. Dengan demikian, pemerintah daerah menanggapi dengan setengah hati apabila ada penunjukan kawasan konservasi di daerahnya.

Dalam isu penataan kawasan, proses, penetapan, dan kekakuan aktivitas pengelolaan baik yang menyangkut penataan batas luar, zonasi, maupun enclave menjadi problematika utama. Ketidaksinkronan penataan kawasan Taman Nasional (TN) yang tidak terintegrasikan dalam sistem penataan ruang daerah dan ego sektoral menjadi alasan terjadinya tumpang tindih pemanfaatan

kawasan TN. Bagaimana dengan nasib hutan lindung? Sebagian besar hutan lindung kita juga tidak memiliki nasib yang lebih baik. Dana yang terbatas, tidak adanya alternatif pembiayaan, desain pengelolaan yang lemah dan tidak adanya keikutsertaan dari masyarakat lokal adalah beberapa penyebab utama lemahnya pengelolaan hutan lindung. Hutan dengan fungsi penting untuk melindungi daerah di bawahnya dan menyediakan jasa lingkungan akan tetapi pada kenyataannya hutan lindung ini menjadi "tidak terlindungi". Pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan untuk pemukiman dan perladangan, alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit adalah beberapa penyebab utama

Pengelolaan kolaboratif merupakan salah satu solusi yang bisa ditawarkan untuk meredam konflik atas pemanfaatan sumber daya hutan di kawasan lindung karena akan menghasilkan situasi yang saling menguntungkan (*win win solution*).



perusakan yang terjadi di dalam hutan lindung. Adanya penerbitan peraturan pemerintah No. 2 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku di Departemen Kehutanan, yaitu sebuah tarif alih fungsi lahan terutama di hutan lindung yang melegalisasi kegiatan pertambangan dengan pembayaran tarif termurah yaitu tiga juta rupiah per hektar per tahun atau Rp. 300,- per m<sup>2</sup>/tahun. Hal ini diperparah dengan tidak adanya peraturan yang mengatur pengelolaan hutan lindung sampai saat ini. Norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan hutan lindung belum diatur oleh pemerintah.

Keluarnya Permenhut No P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam telah menunjukkan bahwa pengelolaan kolaboratif dianggap sebagai alat yang penting untuk memecahkan permasalahan penggunaan lahan yang tumpang tindih di kawasan konservasi. Permenhut ini menyediakan petunjuk yang umum tentang persiapan, implementasi, monitoring dan evaluasi dalam pengaturan kolaboratif. Sebagian besar taman nasional telah dan sedang berada dalam proses kolaborasi ini. Walaupun kebijakan pengelolaan kolaboratif untuk kawasan konservasi telah diatur akan tetapi pada tataran implementasinya masih jauh dari sempurna. Karena Permenhut ini

masih sangat umum, perlu adanya suatu model pengelolaan kolaboratif untuk kawasan konservasi yang dapat dijadikan suatu acuan untuk mempermudah implementasi kolaborasi ini di lapangan.

Di sisi lain, perhatian lebih juga harus diberikan pada hutan lindung. Bagaimana mengelola hutan lindung yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa mengurangi fungsi "lindung"nya?

Perbedaan dalam pemegang kewenangan telah menyebabkan perbedaan dalam administrasi dan mekanisme pengaturan antara kawasan konservasi dengan hutan lindung. Perbedaan antara dua proses pengelolaan kolaboratif antara dua kawasan lindung ini akan menarik untuk dikaji lebih dalam. Penelitian ini melakukan pendekatan studi kasus pada dua kawasan lindung yaitu hutan lindung Gunung Lumut di Kalimantan Timur dan Taman Nasional Sebangau di Kalimantan Tengah. Peran penting dari sistem penggunaan lahan lokal dalam pengelolaan kawasan lindung perlu untuk diidentifikasi dan disaat yang sama menghindari marginalisasi masyarakat lokal.



## Tri Wira Yuwati BPK Banjarbaru

Konflik antara masyarakat lokal dan pengelola kawasan lindung sudah menjadi hal yang umum terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga skala internasional. Di Indonesia, hal ini semakin diperparah dengan gagalnya desentralisasi sehingga konflik kepentingan yang terjadi menjadi sangat multi dimensional.

Pengelolaan kolaboratif menjadi salah satu alternatif resolusi konflik di kawasan lindung, walaupun pada tataran implementasinya tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang panjang dan komitmen yang kuat. Dukungan kebijakan, adanya inisiator yang memulai proses, adanya fasilitator yang bersedia mengawal proses, dukungan aktor lokal dan komitmen pemerintah adalah hal-hal yang menjadi kunci keberhasilan suatu pengelolaan kolaborasi.



Deforestasi dan degradasi hutan dinyatakan telah menyumbang 17% terhadap total emisi gas rumah kaca, termasuk di dalamnya adalah CO<sub>2</sub> (IPCC, 2007). Pada pertemuan antar pihak ke 13 (CoP 13) di Bali, beberapa negara setuju untuk memasukkan deforestasi dan degradasi hutan sebagai salah satu opsi efektif untuk mitigasi iklim setelah masa berlaku Kyoto Protocol di tahun 2012. Mekanisme baru yang dikenal sebagai REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*) secara intensif menjadi agenda diskusi internasional terkait dengan hal tersebut.

Indonesia dan Brasil adalah negara yang dinilai akan memberikan kontribusi besar terhadap mekanisme REDD, mengingat kedua negara ini memiliki luas hutan tropis yang sangat besar dengan laju deforestasi yang juga tinggi (Palmer and Engel, 2009). Sejak tahun 2007 hingga saat ini, negara-negara yang berpotensi untuk masuk dalam skema REDD, termasuk Indonesia, telah melakukan beberapa persiapan untuk dapat masuk dalam mekanisme tersebut. Bantuan finansial dan non finansial dari beberapa



# Perdagangan Karbon dalam Jasa Lingkungan

lembaga donor untuk tahapan kesiapan (*readiness*) dan bahkan aktifitas contoh (*demonstration activities*) telah dilakukan di beberapa area untuk mewakili kondisi nyata pada saat penerapan REDD nanti.

Beberapa proposal terkait dengan REDD telah disusun oleh beberapa negara untuk dapat dinegosiasikan dalam Conference of Parties (CoP). Isu-isu terkait dengan tingkat relevansi, skala implementasi, distribusi pendapatan, pemerintahan dan kepemilikan lahan masih menjadi bahan yang didiskusikan untuk mendapatkan solusi terbaik bagi semua pihak. Kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya masing-masing negara akan menjadi

bahan pertimbangan tersendiri dalam proposal yang diajukan.

Pada CoP 15 di Kopenhagen tahun 2009, cakupan kegiatan lain yang memungkinkan untuk dapat diberikan insentif karbon adalah konservasi hutan, peningkatan cadangan karbon hutan, dan perbaikan pengelolaan hutan lestari (tambahan tanda + pada REDD)

Pada konteks Indonesia, beberapa permasalahan terkait dengan kepemilikan lahan, rencana tata ruang, tata pemerintahan kehutanan dan distribusi pendapatan harus dijawab sebelum masuk dalam skema REDD<sup>+</sup>. REDD<sup>+</sup>

Distribusi pendapatan dari perdagangan karbon harus dilakukan secara adil kepada seluruh pihak terkait sesuai dengan porsinya masing-masing. Distribusi ini hendaknya juga dilakukan dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan antar daerah di Indonesia.



mungkin akan merubah arah kebijakan kehutanan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi menjadi 26% pada tahun 2020 secara sukarela. Dalam hal ini, sektor kehutanan mendapat bagian 14% dari total 26% tersebut.



Pada tahun 2009, Indonesia telah menunjukkan komitmen tersebut dengan menandatangani kerjasama dengan Norwegia dalam hal penurunan emisi yang diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi hutan.



Hal yang harus diperhatikan dalam menyiapkan diri untuk masuk dalam skema REDD adalah skema pengelolaan dan distribusi keuntungan yang diperoleh dari perdagangan karbon tersebut, kepada para pihak-pihak terkait. Hal ini termasuk diantaranya adalah masyarakat yang bergantung pada hutan serta masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang harus tetap mendapatkan kelangsungan mata pencaharian mereka.



Salah satu hal yang menjadikan isu tersebut menjadi penting untuk segera dijawab adalah desentralisasi pengaturannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan masukan terhadap pengambil keputusan terkait dengan mekanisme distribusi pendapatan dalam skema REDD<sup>+</sup>, baik untuk tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Secara rinci tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi pasar lokal, regional dan internasional terkait dengan jasa lingkungan dan mekanisme pembiayaannya.
2. Penentuan mekanisme pembiayaan jasa lingkungan yang terbaik dan dapat diimplementasikan dengan mudah untuk tingkatan tertentu.
3. Penentuan persyaratan kelembagaan untuk mekanisme pembiayaan lingkungan yang efisien, adil dan berkelanjutan.
4. Penentuan peluang dan kendala yang dihadapi dalam hal penjualan jasa lingkungan di tingkat kabupaten, baik secara teknis maupun kelembagaan.
5. Penentuan alternatif skema perdagangan karbon dari hutan lindung dan hutan produksi sebagai tambahan penerimaan bagi pemerintah daerah dan kelestarian hutan.



## Yonky Indrajaya BPK Ciamis

Menjadi mahasiswa PhD dalam bidang ekonomi kehutanan merupakan tantangan bagi saya yang memiliki background study non-ekonomi. Namun demikian, tantangan tersebut terus memacu saya untuk bisa terus maju untuk mencapai gelar PhD.

Penelitian di bidang ekonomi kehutanan terkait dengan imbal jasa lingkungan terutama dari penjualan jasa lingkungan karbon dari kegiatan mengurangi laju deforestasi dan degradasi (REDD+) merupakan hal yang menarik untuk dilakukan, mengingat posisi Indonesia yang memegang peranan besar dalam mitigasi perubahan iklim global dari sektor kehutanan. Saya berharap dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi ilmu pengetahuan dan pengambil kebijakan dalam bidang ini.



Munculnyakesadaransosialsemakindiakui di kalangan bisnis selama dua dekade terakhir (Rosser & Edwin, 2010). Dalam konteks Indonesia, baru-baru ini konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility - CSR*) dalam bisnis kehutanan telah diadopsi secara luas. Dalam industri kehutanan, dianggap baik dilakukan untuk bisnis (Mayers & Vermeulen, 2002). CSR sebagai sebuah praktek dasar sukarela dipandang oleh Komisi Eropa sebagai sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka (Masyarakat Eropa, 2002). Konsep CSR telah diperkenalkan dalam menanggapi panggilan untuk membangun hubungan antara perusahaan dan masyarakat lokal (Simerly, 1992; Steiner & Steiner, 1994). Seperti halnya kelestarian, saat ini praktek tanggung jawab perusahaan seringkali dikategorikan menjadi tiga dimensi tanggung jawab: ekonomi, sosial dan lingkungan. Penerapan praktek-praktek ini berfungsi untuk melegitimasi perusahaan-perusahaan kehutanan dengan menunjukkan komitmen mereka

# Kewajiban Sosial Perusahaan di Bidang Lingkungan

terhadap kelestarian (Vidal & Kozak, 2008).

Perspektif CSR bervariasi antara para pemangku kepentingan dan peneliti. Hal ini secara luas diketahui bahwa 'tipe perusahaan yang dikelola' didorong oleh motif keuntungan (Hyakumura, Seki, & Lopez-Casero, 2007). Namun demikian, praktik CSR terutama dibingkai oleh kepentingan korporasi untuk membangun warga perusahaan 'yang baik' (Waddock, 2007). Di Indonesia, konsep CSR ini kadang-kadang ditafsirkan bertentangan dengan prinsip-prinsip asli CSR (menangani nilai sosial) (Seeger & Hipfel, 2007). Sebagai contoh, beberapa praktek-praktek CSR

di perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia dapat dikelola untuk tujuan keamanan dan aliansi (Welker, 2009).

CSR dapat dilihat sebagai jenis kompensasi yang dapat diciptakan bagi masyarakat lokal (Engel & Martin, 2006; Schirmer & Tonts, 2002) dan untuk kesejahteraan sosial (Steiner & Steiner, 1994), meskipun tekanan kinerja keuangan jangka pendek terus menerus dihadapi oleh perusahaan (Waddock, 2007). Melakukan usaha adalah menekankan pentingnya sektor ekonomi, oleh karenanya memasukkan keprihatinan sosial sering dianggap mahal dan menciptakan kontradiksi antara melakukan 'baik' dan melakukan 'benar'

Kewajiban sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility - CSR*) yang dilakukan oleh perusahaan pengelola sumberdaya alam hendaknya dapat didorong untuk membantu mewujudkan konsep Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yang secara tidak langsung akan meningkatkan kelangsungan mata pencaharian masyarakat yang sangat bergantung pada hutan.



(Deetz, 2007). Temuan ini berpendapat bahwa praktek CSR harus menekankan pada penghindaran risiko ('tidak merugikan') daripada menimbulkan dampak positif atau berbuat baik pada sosial dan lingkungan (Pedersen, 2010).

Dalam konteks kehutanan, sertifikasi hutan telah dianggap sebagai salah satu mekanisme paling efektif dalam menangani praktik pengelolaan hutan yang bertanggung jawab (Vidal & Kozak, 2008). Sertifikasi dirancang dengan harapan bahwa hal itu dapat memfasilitasi perubahan tingkat praktisi, kebijakan, dan pelaksanaan di lapangan, sehingga manfaat hutan dapat lebih adil didistribusikan kepada masyarakat lokal di sekitar hutan (Muhtaman & Prasetyo, 2006). Sertifikasi hutan adalah suatu mekanisme verifikasi pihak ketiga yang menyatakan lingkungan sosial dan praktek-praktek kehutanan yang bertanggung jawab, yang umumnya dikenal sebagai pengelolaan hutan lestari (PHL) (Vidal & Kozak, 2008).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada mendapatkan pengetahuan baru serta dialog atas CSR, terutama dalam memperkuat praktek CSR di lapangan. Hasil penelitian juga diharapkan dapat membantu menjembatani antara perusahaan dan masyarakat lokal yang memiliki keunikan baik dalam hal nilai-nilai sosial budaya dan pengembangan ekonomi lokal yang bergantung pada mata pencaharian berbasis hutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan kontribusi terhadap akademisi, pemerintah pusat dan daerah, peneliti, perusahaan hutan, organisasi non-pemerintah, masyarakat lokal dan masyarakat luas.

Provinsi Kalimantan Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian karena Provinsi ini tercatat sebagai provinsi yang memiliki luas hutan terkecil di Pulau Kalimantan dan diidentifikasi masuk sebagai delapan Propinsi tertinggi dalam kontribusi pendapatan nasional dari sumber daya non-migas (Propinsi Kalimantan Selatan, 2009).

Menurut statistik provinsi Kalimantan Selatan, kawasan hutan di Propinsi ini telah berkurang drastis dalam 20 tahun terakhir. Tingginya tingkat degradasi hutan di Provinsi ini secara langsung akan berpengaruh terhadap pola mata pencaharian masyarakat disekitar hutan. CSR Kehutanan dan Lingkungan diharapkan menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk membantuk masyarakat tersebut dalam mendapatkan kembali mata pencaharian mereka.



## Tri Wahyudiyati Sekretariat Badan Litbang

Kesempatan untuk melanjutkan studi di tingkat PhD dengan mengambil tema CSR di bidang Kehutanan dan Lingkungan telah menambah kemampuan dan pengetahuan saya baik dalam hal networking, pengalaman lapangan maupun negosiasi dengan pihak dengan latar belakang yang berbeda.

Topik CSR dalam kaitannya dengan upaya untuk menjamin kelangsungan mata pencaharian masyarakat lokal menjadi satu hal yang menarik dan kiranya dapat memberikan masukan bagi para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah dalam penyusunan kebijakan. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan memperkaya literatur mengenai CSR bagi para akademisi, peneliti dan pelaku bisnis di bidang Kehutanan.



Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value* - HCV) suatu kawasan menunjukkan bahwa kawasan tersebut layak untuk dikonservasi, karena memiliki fungsi ekologis untuk menyangga kehidupan serta fungsi ekonomis dan sosial bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.

Sebagai salah satu institusi yang turut serta dalam penyusunan panduan penilaian konservasi tinggi di Indonesia, Tropenbos International Indonesia (TBI Indonesia) terus meningkatkan perannya dalam penyediaan informasi maupun pelayanan teknis dan pelatihan terkait dengan HCV.

Pada tahun 2010, TBI Indonesia bekerjasama dengan Badan Litbang Kehutanan dan PT RAPP melakukan penilaian kawasan dengan nilai konservasi tinggi (KNKT) secara menyeluruh untuk satu kesatuan bentang alam Semenanjung Kampar.



# Nilai Konservasi Tinggi Dari Penilaian menuju KPHP

Penilaian KNKT dalam skala bentang alam di Semenanjung Kampar memberikan rekomendasi utama bahwa masyarakat tempatan harus menjadi penerima manfaat utama dari kegiatan pengelolaan SDA di kawasan tersebut. Karenanya, peran pemerintah serta masyarakat dalam pengelolaan hutan rawa gambut di Semenanjung Kampar menjadi prioritas penting dalam pengelolaan SDA pada skala bentang alam secara lestari.

Data dan informasi yang ditemukan di lapangan menunjukkan terjadinya permasalahan yang sangat kompleks

dan memerlukan solusi penyelesaian jangka panjang. Berdasarkan hasil kajian yang komprehensif dan mendalam serta diskusi dengan para pakar, TBI Indonesia merekomendasikan pentingnya pengelolaan kolaboratif Semenanjung Kampar dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat yang berada dalam kawasan tersebut, sebagai solusi penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi secara jangka panjang, yaitu dengan mempromosikan "*Kampar Initiative*".

Rekomendasi mengenai pentingnya pengelolaan kolaboratif di Semenanjung

Komitmen TBI Indonesia dalam mempromosikan nilai konservasi tinggi diwujudkan dalam langkah nyata dengan melakukan penilaian konservasi tinggi secara menyeluruh di Semenanjung Kampar. Data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan penilaian konservasi tinggi ini menjadi data dasar yang digunakan sebagai dasar pembentukan KPHP Model Tasik Besar Serkap oleh Kementerian Kehutanan.



Kampar yang disampaikan oleh TBI Indonesia kepada Kementerian Kehutanan mendapatkan sambutan yang sangat positif dari Menteri Kehutanan. Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, Kementerian Kehutanan telah menetapkan kawasan KPHP untuk membangun pengelolaan kolaboratif untuk pengelolaan Semenanjung Kampar yang berkelanjutan melalui SK Kemenhut No 509/Menhut-VII/2010.

Inisiatif ini mendorong salah satu perusahaan yang berada di zona kawasan lindung gambut PT APP melalui perusahaan PT Putra Riau Perkasa melakukan kesepakatan bersama pengelolaan kolaborasi dengan penandatanganan MoU Deklarasi Kampar yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan dihadiri oleh Gubernur Propinsi Riau, di Beijing China pada tanggal 12 September 2010.

Kebijakan Kementerian Kehutanan tentang KPHP Kolaboratif Semenanjung Kampar dicanangkan diluncurkan pada tanggal 23 September 2010 di Pekanbaru, dengan nama KPHP Tasik Besar Serkap. Pencanaan KPHP Tasik Besar Serkap merupakan langkah awal dalam mewujudkan pengelolaan Semenanjung Kampar dengan prinsip pengelolaan kolaboratif antara pemerintah swasta dan masyarakat. Pada saat bersamaan, PT Putra Riau Perkasa berafiliasi



dengan Sinar Mas Forestry memberikan komitmennya untuk mengalokasikan lebih dari 15.000 hektar area kerja mereka, di Semenanjung Kampar, sebagai area untuk program penyerapan karbon, dan telah melakukan penandatanganan MoU dengan *Carbon Conservation* dalam program “*Kampar Carbon Reserve*”. Dalam program tersebut, kegiatan utama difokuskan pada upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat.

Terkait dengan *Kampar Initiative* dan pembentukan KPHP Tasik Besar Serkap, TBI Indonesia selaku institusi yang melakukan penilaian KNKT secara lisan telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai salah anggota *Steering Committee*. Penyusunan rencana pengelolaan KPH juga disarankan untuk dilakukan dengan mengacu pada data dan informasi dasar yang dihasilkan dari penilaian KNKT.

Pengelolaan kolaboratif Semenanjung Kampar ini diharapkan dapat mengakomodir seluruh kepentingan para pihak dan memberikan solusi yang saling menguntungkan (*win win solution*)



## Mr. Kusnan PT. RAPP APRIL

TBI Indonesia menerapkan pendekatan yang sangat bagus dalam melaksanakan penilaian terhadap nilai konservasi tinggi di Semenanjung Kampar. Keterlibatan banyak pihak yang mewakili latar belakang pengetahuan dan pengalaman serta kepentingan yang berbeda memberikan nilai lebih terhadap hasil kajian yang dilakukan. Kombinasi antara aspek teknis dan non teknis dalam kegiatan tersebut sangat sesuai dengan tujuan TBI Indonesia untuk “Membuat pengetahuan berkarya bagi hutan dan rakyat”

Hasil kajian nilai konservasi tinggi di Semenanjung Kampar yang dilakukan oleh TBI Indonesia memberikan manfaat yang sangat besar kepada PTRAPP-APRIL sebagai bahan acuan untuk penyusunan rencana pengelolaan. PT RAPP-APRIL berkomitmen untuk menggunakan hasil kajian ini dalam proses lebih lanjut terkait dengan Semenanjung Kampar.



Pendekatan bentang alam yang memandang satu kawasan sebagai satu kesatuan ekosistem yang utuh, baik dalam aspek ekologi, ekonomi dan sosial mengharuskan adanya pengelolaan integratif terhadap kawasan tersebut. Restorasi bentang alam merupakan suatu pendekatan untuk melakukan restorasi wilayah dalam skala bentang alam dengan mengintegrasikan aspek biologi, fisik, ekonomi dan sosial dalam kawasan tersebut. Konsep restorasi bentang alam akan sangat baik dilakukan baik dalam penyusunan rencana pengelolaan kawasan maupun revisi tata ruang yang terkait dengan fungsi lahan, terlebih apabila dilaksanakan dengan mengikutsertakan aktif masyarakat yang tinggal pada kawasan tersebut.

Implikasi lapangan mengenai konsep restorasi bentang alam dengan partisipasi masyarakat secara tidak langsung telah dilakukan di banyak tempat di Indonesia. Masyarakat yang tinggal di suatu bentang alam tertentu yang telah memiliki kepedulian lingkungan yang tinggi mulai melakukan restorasi bentang alam di

# Restorasi Bentang Alam

tempat mereka. Beberapa lembaga juga telah melakukan pendampingan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan restorasi bentang alam dan revisi penyusunan tata ruang di beberapa tingkat administrasi.

Tropenbos International Indonesia Programme (TBI Indonesia) bersama dengan IUCN dan ITTO, sejak tahun 2008 telah berupaya untuk melakukan inisiasi dan sosialisasi mengenai nilai penting pendekatan bentang alam dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di Indonesia.

Hal tersebut diawali dengan penyusunan panduan restorasi bentang alam

Indonesia yang dilaksanakan pada bulan Mei 2008 di Batu Karu, Bali dengan melibatkan peserta yang mewakili Kementerian Kehutanan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan perusahaan pengelola sumberdaya alam dan hutan.

Panduan tersebut kemudian dibahas dan disempurnakan melalui seminar nasional restorasi bentang alam yang diadakan pada bulan Desember 2009 di Wanagama, Yogyakarta. Pada seminar ini masing-masing pihak memberikan masukan untuk perbaikan panduan.

Sebagai bagian nyata untuk melihat kemungkinan implementasi restorasi

Pendekatan restorasi bentang alam merupakan salah satu solusi yang ditawarkan dalam pemecahan masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia saat ini. Restorasi bentang alam memandang suatu wilayah dalam satu kesatuan ekosistem yang utuh, yang harus dikelola secara terintegrasi. Penanganan restorasi bentang alam dilakukan melalui pendekatan multi-disiplin dan multi-stakeholders.



bentang alam di Indonesia, peserta seminar juga diajak untuk melihat kondisi Wanagama yang merupakan hasil nyata kegiatan tersebut. Perubahan Wanagama dari suatu areal yang gersang menjadi sebuah oase bagi masyarakat, merupakan bukti nyata keberhasilan perbaikan kualitas lingkungan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar melalui kegiatan restorasi bentang alam.



Pada akhir acara tersebut, TBI Indonesia melakukan inisiasi pembentukan komunitas bentang alam yang kemudian disepakati bernama "Masyarakat Bentang Alam Indonesia - MASENI".

Sosialisasi mengenai restorasi bentang alam ini terus dilakukan oleh TBI Indonesia dengan melibatkan beberapa mitra baru yang potensial dalam hal tersebut.



Pada tahun 2010, TBI Indonesia bekerjasama dengan Badan Litbang Kehutanan serta Universitas Brawijaya Malang, melakukan seminar nasional untuk mengupas mengenai peran restorasi bentang alam dalam proses penyusunan tata ruang. Seminar diikuti oleh lebih dari 100 orang yang merupakan perwakilan dari berbagai instansi pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, akademisi, lembaga swadaya masyarakat serta perusahaan swasta.



Kegiatan seminar tersebut ditujukan untuk menggali pemikiran dalam hal pemanfaatan konsep restorasi bentang

alam dalam proses revisi penyusunan tata ruang di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah menggali pengalaman yang telah dilakukan dalam hal implementasi restorasi bentang alam dalam berbagai bentuk.

Pada kesempatan tersebut banyak hal terkait dengan pengalaman pelaksanaan restorasi di paparkan oleh nara sumber. Hal yang menggembirakan adalah bahwa implementasi restorasi bentang alam telah dilakukan secara sukarela baik oleh masyarakat maupun swasta.

Banyaknya pemikiran baru mengenai kegiatan restorasi yang dituangkan oleh peserta seminar, yang juga merupakan mahasiswa program Master dan Doktoral, dalam bentuk paper menjadi salah satu nilai tambah dalam kegiatan ini.

Pengalaman mengenai pelibatan masyarakat dalam kegiatan restorasi bentang alam juga disampaikan oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat di Malang (Yayasan Kaliandra Sejati). Hal ini menjadi satu pembelajaran berharga dalam hal menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat lokal melalui suatu kegiatan konservasi.



## Prof. Maryunani Universitas Brawijaya

Pendekatan Bentang Alam merupakan salah satu pendekatan yang sudah seharusnya dikembangkan sebagai salah satu alternatif dalam pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini utamanya adalah dengan mengintegrasikan pendekatan tersebut dengan rencana tata ruang yang ke dalam petunjuk teknis kegiatan di lapangan.

Workshop Integrasi Bentang Alam dan Rencana Tata Ruang menjadi langkah awal kerjasama antara Universitas Brawijaya dan Tropenbos International Indonesia yang tertuang di Letter of Intens (LoI). Lebih dari itu peserta workshop menjadi ajang diskusi dalam menambah pengetahuan tentang makna bentang alam itu serta kegunaannya, contoh sukses kegiatan restorasi yang dapat diacu berkaitan dengan keterlibatan masyarakat.



Pembentukan Konsorsium dipelopori oleh TBI Indonesia sebagai upaya untuk membangun kembali konsorsium serupa pada tahun 2003 yang sudah mulai melemah, dan penyebarluasan informasi terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan pembangunan berkelanjutan, khususnya di Propinsi Kalimantan Timur.

Generasi Hijau merupakan perluasan Konsorsium yang melibatkan generasi muda. Semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dapat menjadi anggota generasi hijau.

Pada tahun 2010, Konsorsium Hijau memiliki kegiatan besar terkait dengan perayaan Hari Bumi. Peringatan Hari Bumi 2010 dilakukan dengan mengambil tema "*Green Generation*" dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap lingkungan. Peringatan Hari Bumi ini dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yaitu:



# Konsorsium Hijau

1. Perlombaan penyusunan presentasi dan poster lingkungan. Perlombaan ini diikuti oleh siswa SMP di Balikpapan dengan mengambil tema “ Aku, Bumi dan Perubahan Iklim.”  
Terkait dengan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan berkelanjutan, Konsorsium Hijau juga melakukan perannya dalam hal pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan di kota Balikpapan khususnya, dan Propinsi Kalimantan Timur pada umumnya. Kegiatan tersebut dilakukan baik melalui monitoring langsung maupun dengan penyelenggaraan workshop dan atau working group. Beberapa kegiatan terkait dengan pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh Konsorsium diantaranya adalah:
2. Kemah Riset untuk siswa SMP dan SMA. Kemah Riset ini dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan para peserta dengan alam.
3. Pembentukan “Group Green Generation” yang juga merupakan anggota muda Konsorsium.
4. Workshop terbuka mengenai Identifikasi Permasalahan Lingkungan di Kota Balikpapan.
1. Workshop Revisi Rencana Tata Ruang Samboja Lestari di yayasan BOSF.

Konsorsium Hijau merupakan perkumpulan cair yang beranggotakan para pihak yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan utama dari Konsorsium Hijau adalah untuk memberikan masukan bagi pemerintah terkait dengan masalah lingkungan dan kemiskinan.



2. **Workshop Pengelolaan Kolaboratif Teluk Balikpapan.** Workshop dilakukan dalam kerangka kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Regional Kalimantan.
3. **Meeting dengan dengan UN High Level Advisory Group (HLAG) Delegation, Mr. George Soros dan Mrs. Zohra Dawood** untuk membicarakan mengenai kemungkinan untuk melakukan kerjasama dalam hal perubahan iklim di Propinsi Kalimantan Timur.
4. **Focus Group Discussion terkait dengan Peningkatan Kapasitas dalam Pembangunan Berkelanjutan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.**
5. **Diskusi interaktif dengan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur** terkait dengan rencana pembangunan jembatan pulau Balang di Kalimantan.

Selain kegiatan yang bersifat pengawasan, Konsorsium juga melakukan kegiatan terkait dengan penyediaan informasi lingkungan. Hal ini dilakukan melalui pembentukan sebuah perpustakaan umum lingkungan. Perpustakaan umum ini memiliki koleksi buku-buku yang dapat digunakan oleh semua pihak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ataupun informasi terbaru mengenai

pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk semakin meningkatkan peran dalam menyebarkan informasi dan kepedulian akan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, Konsorsium masih terus berusaha untuk mendapatkan masukan mengenai hal tersebut. Penyebaran informasi kepada generasi muda merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Konsorsium untuk melakukan regenerasi serta pembentukan generasi yang ramah lingkungan, untuk menuju masa depan bangsa yang lebih baik.



## Ishak Yassir Wanariset Samboja

Konsorsium Hijau menjadi sebuah wadah untuk menuangkan kepedulian akan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, di kota Balikpapan khususnya dan Propinsi Kalimantan Timur pada umumnya. Melalui Konsorsium ini kegiatan pemantauan lingkungan dan pembangunan dilakukan oleh anggota Konsorsium, sebagai bahan untuk didiskusikan dengan pemangku kepentingan.

Pelibatan generasi muda dalam Konsorsium Hijau menjadi salah satu langkah untuk lebih meningkatkan kepedulian lingkungan sejak dini. Melalui program ini diharapkan dapat terwujud generasi yang peka terhadap masalah lingkungan dalam pembangunan yang berkelanjutan.



Salah satu bentuk komitmen TBI Indonesia dalam hal penyediaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi dalam mendorong terwujudnya pengelolaan hutan lestari di Indonesia adalah melalui diwujudkannya laboratorium GIS terpadu. Laboratorium ini berdiri pada tahun 2008 dan merupakan hasil kerjasama antara TBI Indonesia dan Badan Litbang Kehutanan.

Tujuan utama pembentukan laboratorium GIS terpadu adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana terkait dengan pengolahan dan analisa data spasial. Hal ini ditujukan baik untuk meningkatkan kapasitas staff di lingkup Badan Litbang Kehutanan maupun mitra yang lain terkait dengan kemampuan di bidang pengolahan data dan analisis data spasial.

Saat ini laboratorium GIS terpadu melakukan tugasnya dalam mendukung kegiatan TBI Indonesia serta melakukan pelayanan terhadap kebutuhan mitra, dalam hal ini adalah Badan Litbang Kehutanan. Beberapa kegiatan kolaborasi yang dilakukan oleh laboratorium

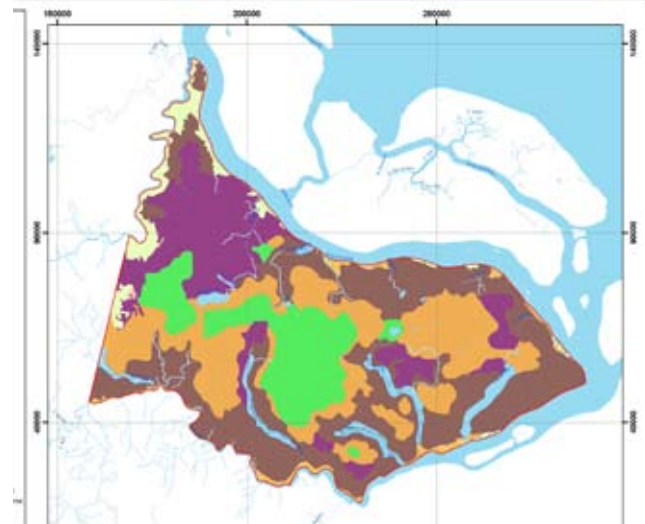
# Lab. GIS Terpadu

GIS terpadu dengan Badan Litbang Kehutanan diantaranya adalah:

1. Survei terestrial untuk pemetaan hutan penelitian di Darmaga. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu Badan Litbang Kehutanan dalam melakukan pemetaan hutan penelitian Darmaga. Survey dilakukan dengan mengikutsertakan tim GIS TBI Indonesia dan 2 orang staff Badan Litbang Kehutanan.
2. Survei terestrial untuk pemetaan pohon koleksi Ciromet di Sumedang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung Badan Litbang Kehutanan dalam melakukan pemetaan kawasan pohon koleksi di Ciromet, Kabupaten Sumedang. Survey ini diikuti oleh tim GIS dari TBI Indonesia dan 3 orang staff dari badan litbang kehutanan.
3. Survei pemetaan terestrial hutan penelitian Pasir Awi, Kabupaten Bogor. Survey ini melibatkan tim GIS TBI Indonesia dan 2 orang staff badan litbang kehutanan.
4. Survei terestrial untuk pemetaan hutan penelitian di Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung. Survey dilakukan dengan melibatkan tim GIS TBI Indonesia dan 3 orang staff Badan Litbang Kehutanan.

Laboratorium GIS terpadu adalah salah satu fasilitas yang dimiliki oleh TBI Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengolahan dan penyusunan data spasial.

Layanan yang diberikan oleh laboratorium GIS terpadu TBI Indonesia meliputi jasa konsultasi pemetaan, survey serta pelatihan GIS bagi mitra kerjasama.



Laboratorium GIS terpadu juga memberikan layanan training GIS yang dilakukan baik dalam bentuk kelas maupun on the job training. Training juga diberikan dalam bentuk terpadu dengan materi training yang lain, seperti penilaian nilai konservasi tinggi.

Laboratorium GIS terpadu juga melakukan pengolahan dan analisis data terkait dengan kegiatan yang dilakukan intern oleh TBI Indonesia. Pada tahun 2010, kegiatan tersebut diantaranya adalah:

1. Analisis spasial perubahan lahan 2000-2005 dan 2005 - 2009 untuk propinsi Papua dan Riau .
2. Analisis data spasial untuk penentuan area dengan nilai konservasi tinggi di Semenanjung Kampar.
2. Analisa data spasial untuk menentukan rencana pengelolaan terpadu di Semenanjung Kampar.
3. Analisis perubahan lahan untuk kelapa sawit dengan skala nasional, regional dan international.

Terkait dengan program utama TBI Indonesia dalam penciptaan ilmu pengetahuan baru melalui Phd program, Laboratorium GIS terpadu juga memberikan layanan untuk mendukung kegiatan tersebut.

1. Pengukuran stok karbon di areal PT. Inhutani II Unit Malinau

terkait dengan proyek penelitian pembayaran jasa lingkungan (Payment for Environmental Services- PES) dalam perdagangan karbon.

2. Penentuan lokasi penelitian untuk project penelitian pengelolaan kolaboratif kawasan lindung di Taman Nasional Sebangau dan Hutan Lindung Gunung Lumut.
3. Pengolahan dan analisis data perubahan lahan di Kecamatan Jorong, kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan terkait dengan proyek penelitian CSR.
4. Pengolahan dan analisis data perubahan lahan di Hutan Lindung Gunung Lumut, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat terkait dengan proyek penelitian revisi tata ruang kolaboratif.



## Agustinus P. Tampubolon Puslitbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan

Pemetaan terestrial lokasi koleksi Pohon Energi Puslitbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan Laboratorium GIS TBI Indonesia.

Hasil kegiatan tersebut sangat memuaskan dan sangat informatif sehingga dapat digunakan untuk kepentingan bersama di lingkup Badan Litbang Kehutanan.

Kolaborasi antara TBI Indonesia dan institusi di bawah Badan Litbang Kehutanan, terkait dengan pemanfaatan teknologi GIS perlu ditingkatkan dalam rangka mendukung pengelolaan hutan yang lebih baik.



Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan institusi (capacity building) merupakan salah satu program utama TBI Indonesia sebagai upaya untuk menuju tata kelola kehutanan yang lebih baik. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, TBI Indonesia bersama dengan Badan Litbang Kehutanan dan beberapa lembaga terkait mengadakan beberapa pelatihan sebagai berikut:

1. Pelatihan penilaian Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (KNKT) untuk tingkat teknis. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 26 – 31 Juli 2010, dan bertempat di Yogyakarta. Pelatihan dilaksanakan dalam kerjasama dengan TNC dan Instiper Yogyakarta dan diikuti oleh 16 orang peserta. Pelatihan dilaksanakan dengan menitik beratkan pada pemahaman peserta mengenai konsep KNKT serta praktek lapangan untuk pengambilan data dan informasi serta penyusunan laporan hasil penilaian tersebut.
2. Pelatihan Sistem Informasi Geografis dan membangun skema



# Peningkatan Kapasitas Mitra, Staff dan Institusi

Sertifikasi Geomatik. Pelatihan ini diselenggarakan oleh TBI Indonesia bekerjasama dengan Pusat Diklat Kehutanan dan Persaki dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan pemahaman di bidang SIG, penginderaan jauh dan pentingnya sertifikasi profesi. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 18 - 28 Agustus 2010 di Pusat Diklat Kehutanan dan diikuti oleh 28 orang yang merupakan perwakilan dari Kementerian Kehutanan, Universitas dan perusahaan swasta.

3. Pelatihan kepastakaan. Pelatihan dilaksanakan bersama dengan konsorsium instansi dan LSM peduli lingkungan di Balikpapan dan Samarinda pada tanggal 21 - 23 Juli 2010 dan diikuti oleh 26 orang

peserta yang merupakan perwakilan dari sekolah, anggota konsorsium, badan litbang kehutanan dan masyarakat. Pelatihan kepastakaan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan perpustakaan.

4. Pelatihan penilaian Kawasan dengan Nilai Konservasi tinggi untuk tingkat manager. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 23 - 29 Oktober 2010 di Yogyakarta. Pelatihan ini dilaksanakan dalam kerjasama antara TBI Indonesia, TNC, WWF, IPB dan Instiper. Pelatihan diikuti oleh 38 peserta dari perusahaan perkebunan, HTI, Badan Litbang Kehutanan, Universitas dan pelaku kegiatan kehutanan lainnya. Pelatihan dilakukan dalam

Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan institusi merupakan salah satu program utama TBI Indonesia. Program peningkatan kapasitas dilakukan dalam kerangka kerjasama dengan Badan Litbang Kehutanan serta mitra lain terkait.



bentuk kelas yang dikombinasikan dengan praktek lapangan untuk lebih memantapkan kemampuan peserta dalam hal penggunaan data dan informasi yang diperoleh dari hasil penilaian untuk penyusunan rencana pengelolaan kawasan.

5. Pelatihan GIS di Universitas Riau. Pelatihan ini dilakukan dalam kerjasama antara TBI Indonesia, Badan Litbang Kehutanan, Universitas Riau serta PT RAPP. Pelatihan diikuti oleh mahasiswa dan staff dosen Universitas Riau, Dinas Kehutanan Kabupaten dan Propinsi serta staff PT RAPP.
6. Pelatihan untuk Surveyor di Herbarium Bogorienses. Pelatihan ini merupakan kerjasama antara TBI Indonesia dan LIPI dan ditujukan untuk memberikan bekal kepada para anggota tim yang akan melakukan penilaian kawasan dengan nilai konservasi tinggi di Semenanjung Kampar.

Program peningkatan kapasitas juga dilakukan untuk staff TBI Indonesia dengan mengirimkan staff ke beberapa workshop dan atau pelatihan, diantaranya adalah:

1. Pelatihan Penulisan laporan Berkelanjutan, terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility - CSR*). Pelatihan ini dilaksanakan di Jakarta dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman

peserta mengenai konsep CSR serta penyusunan laporan terkait dengan kegiatan CSR tersebut.

2. Pelatihan Fasilitator di Surabaya. Pelatihan ini diadakan oleh WASPOLA dan difasilitasi oleh AUSAID. Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam hal melakukan fasilitasi kegiatan.
3. Pelatihan Visualisasi Bentang Alam. Pelatihan ini dilaksanakan di Bali oleh IUCN bekerjasama dengan Departemen Kehutanan. Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam hal penyusunan visualisasi sederhana mengenai Bentang Alam.
4. Pelatihan "*Governance of Forest, Nature and People*". Pelatihan ini diselenggarakan oleh Wageningen University, Belanda dengan mengambil tempat di CIFOR, Bogor.
5. Workshop pembentukan SCGIS (*Society of Conservation Geographic Information System*), pada tanggal 24 November 2010, di IPB Convention Center.



## Yanuar Wicaksono CV Pollito

Pelatihan Penilaian Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (KNKT) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM dibidang perkebunan dan kehutanan sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan perkebunan dan kehutanan secara berkelanjutan dengan mengedepankan Nilai Konservasi Tinggi sebagai bagian penting.

Modul pelatihan dan variasi penyampaian yang mengkombinasikan antara teori dan praktek serta trainer yang memiliki banyak pengalaman dalam penilaian NKT diberbagai sektor, sangat membantu peserta dalam memahami keterkaitan antar kriteria nilai konservasi tinggi yang ditetapkan dalam Toolkit KNKT Indonesia.

# Manajemen Unit



Sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri dengan lokasi kegiatan, pada awal pendirian TBI Indonesia memutuskan untuk memiliki kantor di Balikpapan. Hal ini dilakukan dengan berdasarkan pada pertimbangan teknis, bahwa saat tersebut TBI Indonesia hanya melakukan kegiatan dengan konsentrasi di Kalimantan Timur.

Seiring dengan semakin luasnya wilayah kerja TBI Indonesia, pada tahun 2004 TBI Indonesia memutuskan memiliki kantor cabang di Bogor, bertempat di Badan Litbang Kehutanan. Hanya saja, saat itu kantor cabang belum banyak digunakan dikarenakan fokus kegiatan masih mencakup wilayah pulau Kalimantan.

# Operasional Kantor

Pada tahun 2008, seiring dengan adanya perbaharuan MOU antara Tropenbos International (TBI) dan Badan Litbang Kehutanan, yang kemudian memutuskan bahwa wilayah kerja TBI Indonesia diperluas hingga mencakup seluruh wilayah Indonesia, kantor cabang di Bogor mulai difungsikan secara maksimal.

Peningkatan fungsi kantor cabang di Bogor juga dimaksudkan untuk lebih mendekatkan diri dengan mitra utama TBI Indonesia, yaitu Badan Litbang Kehutanan.





Dalam pelaksanaan kegiatannya, TBI Indonesia didukung oleh 13 orang staff, yang bertempat di Kantor Balikpapan dan Kantor Bogor.

Selain 13 orang staff tetap tersebut, beberapa intern dan konsultan juga bekerja untuk TBI Indonesia sesuai dengan kegiatan yang ada.

Intern di TBI Indonesia menjadi salah satu bagian dari program peningkatan kapasitas dan penelitian yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan atau pelajar yang ingin menambah dan meningkatkan pengetahuan mereka di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan hutan.

Konsultan di TBI Indonesia melakukan pekerjaan sesuai dengan volume kegiatan yang ada, dan sebagian besar merupakan bagian dari perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat.

## Staff

1. Petrus Gunarso - Director Programme.
2. Kresno D Santosa - Forest Management Spesialist & HCVF Assessor.
3. Aritta Suwarno - Communication Officer.
4. G Manjela Eko Hartoyo - GIS Coordinator.
5. Yulita Lestiawati - Office Manager .
6. Sahid Robijaksani - Finance.
7. Yuli Nugroho - GIS Consultant.
8. Ario Bhirowo - GIS Consultant.
9. Denni Indrawan - Office Assistant Balikpapan.
10. Kartika Suryaningrum - Office Assistant Bogor.
11. Mohammad Isa Ansori - Librarian.
12. Sariman - Driver.
13. Pijar Tandi Lolok - Driver.

TBI Indonesia bekerja dengan didukung oleh 13 orang staff serta beberapa intern. Komposisi staff dengan keragaman latar belakang menjadi modal dasar TBI Indonesia dalam melaksanakan semua kegiatan di tahun 2010.



## Intern

1. Tessa Meulenstein - Leiden University.
2. Lien Imbrechts - Leuven University.
3. Ismail - Universitas Gadjah Mada.
4. Sandy Puspoyo - Universitas Nusa Bangsa.
5. Tetuko Yuwono - Universitas Gadjah Mada.

## Konsultan

1. Ir. Haryanto S Putro, MS - Institut Pertanian Bogor.
2. Titiek Setyawati, Ph.D - Badan Litbang Kehutanan.
3. Tukirin Padmomihardjo, Ph.D, APU - LIPI Biologi.
4. Dr. Harnios Arief - Institut Pertanian Bogor.
5. Ir. Rachmat Hermawan, M.Sc - Institut Pertanian Bogor.
6. Ir. Dedi Kusnadi Kalsim, M.Eng - Institut Pertanian Bogor.
7. Dr. Tejo Baskoro - Institut Pertanian Bogor.
8. Ir. Sutoyo, M.Si - Institut Pertanian Bogor.
9. Dr. Ahmad Kurnain - Universitas Lambung Mangkurat.
10. Ir. Daru Asycarya, MM - Ideas.



11. Wisnu Caroko, S.Si - NTFP Indonesia.
12. Dr. Wawan - Universitas Riau.
13. Supriatin, S.Hut - Institut Pertanian Bogor.
14. Dr. Bahruni Said - Institut Pertanian Bogor.
15. Ir. Nandi Koosmayandi, M.Sc - Institut Pertanian Bogor.
16. Yun Yundarti, S. Hut - Institut Pertanian Bogor.
17. Fadil Nandila, S.Pi - Laksamana Samodera.
18. Acta Withamana, S. Si - Institut Pertanian Bogor.
19. Ishak Yassir, M.Si - Wanariset Samboja.

## Tetuko Yuwono Universitas Gadjah Mada

Saya merasa beruntung dapat bergabung dengan TBI Indonesia karena selama mengikuti program magang di TBI Indonesia, saya mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu. pengalaman dan ilmu ini merupakan penerapan dari teori yang saya dapat di bangku perkuliahan. Selain itu, saya juga memahami posisi organisasi non pemerintah, dalam hal ini TBI Indonesia sebagai rekan penelitian Kementerian Kehutanan Indonesia dan lembaga independen yang bergerak dibidang penelitian. Pengamalan Kegiatan yang saya dapatkan semoga dapat menjadi bekal untuk terus berkarya membangun Kehutanan Indonesia.

Untuk kedepan, saya berharap agar program magang ini dapat tersebar informasinya di lingkungan universitas, sehingga issues terbaru tentang kehutanan beserta penelitiannya dapat lebih mudah diakses oleh mahasiswa. Semoga dengan topikterbaru, penelitian TBI Indonesia dapat terus berkarya dengan penelitian penelitiannya, sehingga dapat berkontribusi membangun Kehutanan Indonesia.





# General Board

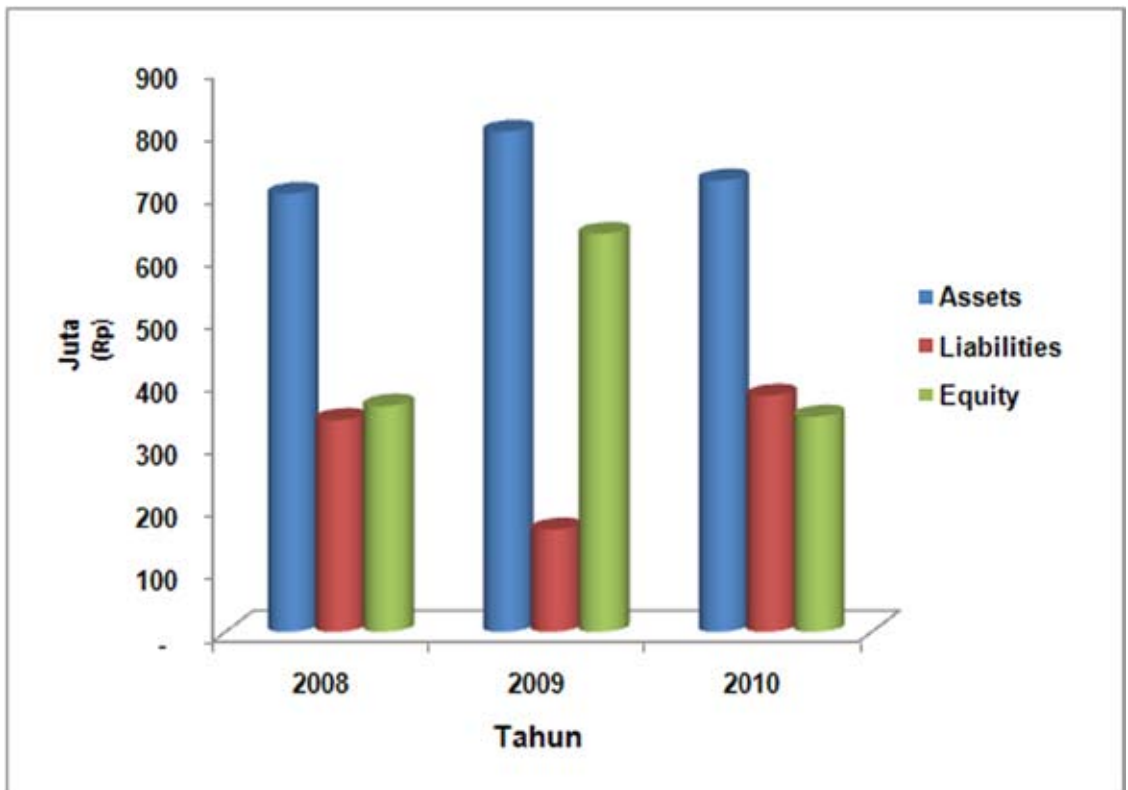
- **Mr. Alhassan Attah**  
Executive Director, Timber Industry Development Division, Forestry Commission Ghana.
- **Prof.dr. A.J. Dietz (Executive Committee)**  
Faculty of Social and Behavioural Sciences - Department of Human Geography, Planning and International Development Studies, Universiteit van Amsterdam, the Netherlands.
- **Ms. H. van den Hombergh**  
Co-ordinator of Nature and Poverty network based at the IUCN Netherlands Committee.
- **Prof. J.L. Jiggins (Executive Committee)**  
Professor Human Ecology, Wageningen University, the Netherlands.
- **Ms Y. Kakabadse Navarro**  
Senior Adviser of Fundacion Futuro Latinoamericano, Ecuador.
- **Ms. C. Martínez**  
Executive Director of E3-Ecology.
- **Prof.G.M.J. Mohren (Executive Committee)**  
Professor Forest Ecology and Forest Management Group, Wageningen University, the Netherlands.
- **Prof.R. Rabbinge ( chair )**  
Chairman Wageningen Graduate Schools, Wageningen University, the Netherlands.
- **Prof. G. Gryseels**



# General Board dan Bi-National Steering Comitee

## Bi-National Steering Comitee

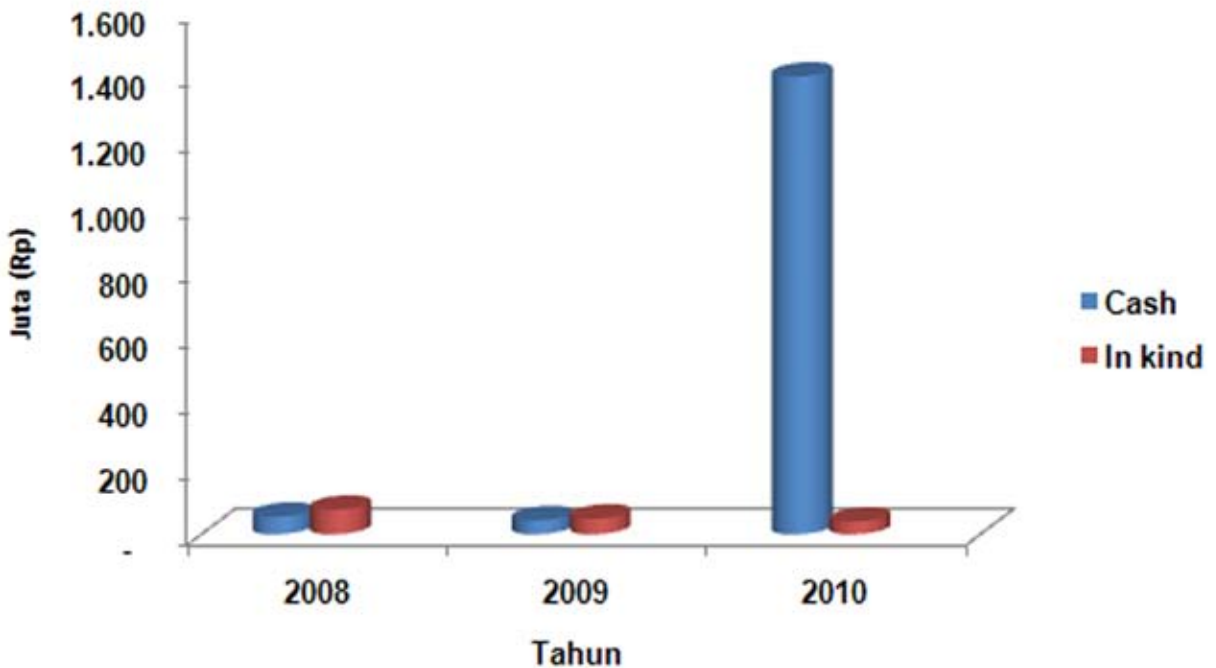
No	Nama	Institusi	Keterangan
1	Dr. Ir. Tachrir Fathoni, MSc	Kepala Badan Litbang Kehutanan, Kementerian Kehutanan	Ketua
2	Dr. Ir. Putera Parthama, MSc	Sekretaris Badan Litbang Kehutanan, Kementerian Kehutanan	Sekretaris
3	Ir. Adi Susmianto, M Sc	Kepala Pusat P3HKA, Badan Litbanag Kehutanan	Anggota
4	Dr. Ahmad Delmy, MAgr	Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur	Anggota
5	Zulkifli Yusuf, SH	Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau	Anggota
6	Drs. H. Tuparman MM	Badan Lingkungan Hidup Kaltim	Anggota
7	Ir. Herry Prijono, MSc	Kepala Balai Besar Penelitian Dipterocarpaceae	Anggota
8	Ir. Luthfi Ahmad, MM	Kepala Taman Nasional Betung Kerihun	Anggota
9	Prof. Dr. Ir. Afif Ruchaemi, M.Agr.	Universitas Mulawarman	Anggota
10	DR. Ir. Agus Sarsito, MSc	Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan	Anggota
11	Ir. Gatot Irianto, M.S, Ph.D	Badan Litbang Pertanian	Anggota
12	Dr. Rene Boot	TBI Wageningen	Anggota
13	Dr. Roderick Zagt	TBI Wageningen	Anggota
14	Dr. Petrus Gunarso	Programme Director TBI Indonesia	Anggota



Pendanaan kegiatan dan operasional TBI Indonesia dipenuhi dari dana 'core' dari TBI di Wageningen, Belanda, *associate project* serta kolaborasi dari mitra.



# Laporan Keuangan



Pada tahun 2010, laporan keuangan TBI Indonesia menunjukkan adanya peningkatan dana yang berasal dari *associate project* dan kegiatan kolaborasi dengan mitra.





## Lingkup Departemen Kehutanan

- Badan Litbang Kehutanan
- Direktorat Jendral Bina Produksi Kehutanan
- Direktorat Jendral Planologi Kehutanan
- Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

## Lingkup Departemen Lainnya

- Kementerian Ristek dan Teknologi
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Bappenas
- Kementerian Pekerjaan Umum

## Pemerintah Daerah

- Dinas Kehutanan Propinsi Papua
- BPKH X Papua
- BPK Samarinda
- Pusat LH Regional Kalimantan
- Dinas Kehutanan Propinsi Riau

# Mitra dan Jaringan

- Dinas Kehutanan Propinsi Bali
- Dinas Kehutanan Kab. Siak
- Dinas Kehutanan Kab. Rokan Hulu
- Dinas Kehutanan Kab. Sarmi
- Dinas Kehutanan Kab. Boven Digoel
- Dinas Kehutanan Kab. Merauke
- Dinas Kehutanan Kab. Gunung Kidul
- Bappeda Propinsi Kalimantan Timur
- Bappeda Kota Balikpapan
- Bappeda Kab. Malinau
- BLH Kota Balikpapan
- KWPLH Kota Balikpapan
- BPHL Sungai Wain
- Bappeda Propinsi Papua
- Bappeda Kab. Paser

## Universitas dan Sekolah

- Institut Pertanian Bogor
- Universitas Gadjah Mada
- Universitas Mulawarman
- Universitas Lambung Mangkurat
- Universitas Riau
- Universitas Sahid
- Instiper
- Universitas Lampung
- Universitas Palangkaraya
- Universitas Brawijaya
- CML, Leiden University
- ITC
- Wageningen Universiteit
- Charles Sturt University
- Australia National University
- SMP Negeri 1 Balikpapan
- SMP Negeri 3 Balikpapan
- SMP Negeri 6 Balikpapan

TBI Indonesia menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah, universitas, lembaga penelitian non pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat. Keragaman mitra kerja ini memperkuat jaringan TBI Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya di Indonesia.

- SMP IT Istiqomah Balikpapan
- SMK 3 Balikpapan
- SMU Negeri 1 Balikpapan
- SMU Negeri 8 Balikpapan

## Perusahaan Swasta

- RAPP - APRIL
- Sinar Mas Forestry
- Astra Agro Lestari
- Pertamina
- PT. Kaltim Prima Coal
- PT. Kurnia Group
- PT. Rimba Raya Conservation
- PT. Adimitra Lestari
- PT. Chevron
- Daemeter Consulting
- KPMG

## Lembaga Penelitian Non Pemerintah

- CIFOR
- ICRAF
- IUCN
- CIMTROP - Universitas Palangkaraya

## Lembaga Swadaya Masyarakat

- RSPO
- Forest Watch Indonesia
- NTFP Indonesia
- BOSF
- TNC
- WWF
- IHSA
- STABIL
- CI - Indonesia Programme
- FFI - Indonesia Programme
- Rainforest Alliance
- Yayasan Peduli

## Lembaga Donor

- USAID
- RAFT
- ITTO
- AUSAID







# LAPORAN TAHUNAN TBI Indonesia

## Konsep dan Editorial

Aritta Suwarno

Petrus Gunarso

Tropenbos International Indonesia Programme (TBI Indonesia) berterima kasih kepada Badan Litbang Kehutanan selaku mitra utama, serta mitra-mitra pendukung yang lain atas dukungan yang diberikan.

Untuk mendapat informasi mengenai kegiatan TBI Indonesia,  
kunjungi [www.tropenbos.org](http://www.tropenbos.org)



Dengan menjadikan pengetahuan berkarya bagi hutan dan rakyat, Tropenbos International memberikan kontribusi nyata terhadap pengambilan keputusan yang berwawasan untuk perbaikan manajemen dan tata kelola hutan tropika. Pengalaman lapangan yang panjang dan kemampuan untuk mempertemukan mitra lokal, nasional dan internasional menjadikan kami mitra terpercaya dalam pembangunan berkelanjutan.



Tropenbos International Indonesia Programme  
Gedung Sylva Graha PT. Inhutani I, It 2  
Jl. Jend. Sudirman No. 27  
Balikpapan 76100  
Indonesia  
Tel (0542) 820 503, 820504  
Fax (0542) 4445666

Tropenbos International Indonesia Programme  
Jl. Gunung Batu No. 5  
Bogor 16610  
Indonesia  
Tel/Fax (0251) 8638410